

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.kompas.com
Media Cetak	

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Politisi PSI Nilai Banyak Aspek yang Belum Berjalan Efektif

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase tiga di DKI Jakarta bakal berakhir 4 Juni 2020.

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai bahwa pelaksanaan PSBB di DKI belum cukup efektif.

Ia menilai, masih rendahnya penegakan regulasi di lapangan meski sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

"Paparan Gubernur DKI tanggal 19 Mei 2020 menunjukkan bahwa proporsi warga yang di rumah hampir 60 persen dan angka reproduksi (Rt) 1,1 artinya jumlah kasus masih bertambah. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa PSBB di Jakarta masih belum efektif," ucap Justin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

"Masih banyak warga beraktifitas di luar rumah, padahal tidak ada kepentingan yang mendesak," lanjutnya.

Selain itu, menurut dia, dari sisi kapasitas layanan medis, PSBB bertujuan untuk menjaga agar kapasitas layanan medis mampu mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus tanpa ada pasien yang terlantar.

Seharusnya masa PSBB dipakai untuk memperbanyak jumlah tes dan menambah kapasitas layanan rumah sakit.

"Kenyataannya, jumlah tes swab yg dilakukan oleh Pemprov DKI masih berkisar 600 hingga 800 tes per hari. Jumlah ini masih jauh dari memadai untuk bisa mendeteksi kasus secara cepat. Akibatnya, per hari ini jumlah ODP dan PDP masih menumpuk sehingga terjadi antrian untuk tes," kata Justin.

Yang terakhir, ia berpendapat bahwa belum ada upaya yang cukup agresif dari Pemprov DKI untuk mempersiapkan ruang-ruang perawatan pasien dan memperbanyak ventilator dalam jumlah yang masif, serta tempat-tempat karantina khusus bagi pasien yang sudah sembuh atau kasus Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Seharusnya selama 2-3 bulan kemarin digunakan untuk menyiapkan wisma, rusun, atau GOR menjadi tempat-tempat karantina, sehingga nanti tidak panik atau kelabakan jika ada lonjakan kasus," tuturnya.